

Pendapatan Retribusi Daerah- TWA Bantimurung Ramai Dikunjungi Pada Libur Lebaran



Sumber gambar:

https://www.antaranews.com/berita/4054713/twa-bantimurung-ramai-dikunjungi-pada-libur-lebaran#google_vignette

Taman Wisata Alam (TWA) Bantimurung di Kabupaten Maros ramai dikunjungi pada saat hari kedua libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

"TWA Bantimurung ini adalah ikon wisata Kabupaten Maros yang menjadi andalan sejak dulu hingga saat ini dengan jumlah kunjungan dapat mencapai 1.000 hingga 6.000 pada saat liburan atau peak season," kata Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Ferdiansyah di Maros, Kamis.

Dia mengatakan, TWA Bantimurung yang merupakan bagian dari bentangan kawasan karst di Kabupaten Maros ini merupakan TWA terindah kedua di dunia setelah kawasan wisata karst di Denmark.

Menurut dia, saat libur Hari Raya Keagamaan Bantimurung selalu menjadi langganan untuk berekreasi bersama keluarga, kerabat dan teman. Baik merupakan warga Maros maupun dari luar Kabupaten Maros.

Hal itu dibenarkan oleh salah seorang pengunjung Bantimurung yang berasal dari Kota Makassar, Herlina.

"Kami rela jauh-jauh ke Bantimurung untuk menikmati panorama alam dan hawa sejuk di tempat ini bersama keluarga," katanya.

Meski diakui, retribusi masuk ke lokasi wisata itu lebih mahal dibandingkan destinasi wisata lainnya di Kabupaten Maros, namun tidak menyurutkan niatnya berwisata ke tempat ini.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Menurut dia, karcis loket masuk seharga Rp35 ribu per orang untuk dewasa akan terasa berat jika membawa banyak anggota keluarga. Namun itu telah disiasati dengan menyisihkan sebagian dana THR yang diterima sebelum lebaran.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangguh miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. https://www.antaraneews.com/berita/4054713/twa-bantimurung-ramai-dikunjungi-pada-libur-lebaran#google_vignette
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.